



Siswa Daerah Blank Spot Terancam Tak Bisa Sekolah

OMBUDSMAN RI (ORI) Perwakilan DIY terus mengawal jalannya PPDB, diantaranya dengan Sekretariat Bersama Pos Pengaduan. Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masdhuri mengatakan, sekretariat bersama ini untuk mengawal agenda besar PPDB, dimana untuk tahun keduanya menyelenggarakan sistem zonasi.

"Kita pahami, bahwa penyelenggaraan sistem zonasi ini adalah sebagai spirit memberikan keadilan dan pemerataan kualitas pendidikan, siswa, sarana dan prasarana dan anggaran pendidikan," terangnya.

Terkait hal tersebut, dalam sistem zonasi kali ini pihaknya telah melakukan pe-

mantauan dan mendapati terdapat *blank-spot* atau wilayah yang tak terakomodasi dalam radius zona. Sehingga, lulusan SD di wilayah tersebut terancam tak bisa mendaftar di SMP, lantaran peraturan zonasi.

Ia menerangkan, di Kota Yogyakarta ada wilayah tak terkena radius, misalnya Wirobrajan. Akhirnya anak-anak di sana tak bisa sekolah di negeri, karena tak ada sekolah yang dekat.

"Sementara di Gunungkidul banyak daerah tak masuk zona, namun mendapatkan pengecualian dan tetap boleh mendaftar di sekolah, meskipun jaraknya jauh," tambahnya.

Suki Ratnasari, Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Lembaga Ombudsman DI Yogyakarta (LODIY) mengatakan, terdapat 5.800-an lulusan SD di Kota Yogyakarta, namun daya tampung SMP negeri hanya sekitar 3.200-an.

"Tapi ini bukan alasan siswa tak mendapatkan bangku. Terlebih untuk anak-anak yang terdapat di area *blankspot*. Kedepan kami menyarankan agar dapat kerja sama dengan Disdukcapil, sehingga persebaran siswa dapat jelas dan sistem zonasi bisa optimal. Jadi zonasi bisa lebih fleksibel dan anak-anak yang berada di *blankspot* tetap bisa sekolah, meskipun dia berasal dari luar zona," terangnya. (nto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005